

Anggaran Ganda Kebersihan DKI Warga Dikelabui

[JAKARTA] Alokasi anggaran kebersihan dan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta ternyata ganda. Warga dikelabui karena tidak tahu anggaran ganda itu. Soalnya, APBD DKI tidak pernah dipublikasikan ke publik.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Panitia Persiapan Pembentukan Organisasi Rakyat (P3OR) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Dedy Ramanta, dalam diskusi publik bertema "Menggerakkan Komunitas Pengelolaan Sampah" di Jakarta, Rabu (29/10).

Dijelaskan, alokasi anggaran kebersihan dalam APBD 2008 ada juga di setiap tingkat kecamatan yang berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Sedangkan untuk tiap kelurahan, besarnya antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta per tahun.

"Jadi, alokasi anggaran kebersihan sampah di Jakarta bukan hanya ada pada Dinas Kebersihan dan Sub Dinas (Sudin) Kebersihan Kotamadya, tetapi juga ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ini yang menyebabkan terjadinya *double* anggaran dalam APBD," kata Dedy.

Ditambahkan, alokasi anggaran kebersihan sampah di tiap kecamatan dan kelurahan tidak pernah disosialisasikan camat dan lurah kepada warganya. "Akibatnya, biaya kebersihan sampah tetap dipungut pengurus RT/RW ke warga," ujarnya.

Menurut data, alokasi anggaran Dinas Kebersihan DKI pada APBD 2008 sekitar Rp 620 miliar. Sedangkan, untuk Sudin Kebersihan setiap Kotamadya sekitar Rp 30 miliar. Sedangkan untuk Sudin Kebersihan Kepulauan Seribu hanya Rp 3 miliar.

Ketua Dewan Daerah Walhi Jakarta Bagong Suyoto menambahkan, dengan adanya alokasi anggaran yang begitu besar ke setiap kelurahan, sudah sepantasnya pungutan biaya sampah ke masyarakat ditiadakan. Kenyataan di lapangan, kata dia, walaupun biaya sampah dipungut dari warga, tetap saja sampah berserakan di setiap sudut kota.

Insentif

Bagong meminta Pemprov DKI mengalokasikan anggaran kebersihan sampah ke pengelola sampah secara langsung. "Seharusnya, anggaran kebersihan sampah dialokasikan kepada para ibu-ibu kader lingkungan yang mampu mengolah sampah di tempat tinggal mereka. Insentif itu akan memacu warga lainnya untuk mengelola sampah sendiri," ujar Bagong. Peserta diskusi, Istari (48) mengaku, mengelola sampah di lingkungan RW 13 Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur murni swadaya masyarakat.

Istari yang merupakan fasilitator pengelolaan sampah di lingkungan itu memperoleh sumber dana dari iuran warga sekitar Rp 5.000 per bulan ditambah bantuan para donatur. [HTS/Y-4]